

**Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik  
Pada pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024 di Kota Manado**

**Yeheskiel Lutter<sup>1</sup>  
Fanley Pangemanan<sup>2</sup>  
Franky Rengkung<sup>3</sup>**

*Email Korespondensi:* e-mail : [lutteryehekiel@gmail.com](mailto:lutteryehekiel@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Fokus penelitian mencakup perencanaan program sosialisasi, pemanfaatan sumber daya organisasi, metode komunikasi politik, serta inovasi yang diterapkan dalam menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi politik, keterbatasan anggaran, dan dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Manado menerapkan beberapa strategi utama, yaitu: (1) penguatan sosialisasi berbasis komunitas dan kelompok strategis; (2) pemanfaatan media digital dan penyebaran informasi melalui platform resmi; (3) kolaborasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan media; serta (4) pengembangan program edukasi pemilih untuk meningkatkan kesadaran politik. Strategi tersebut secara umum berdampak positif dalam meningkatkan partisipasi pemilih, meskipun masih terdapat kendala berupa persebaran informasi yang tidak merata, faktor apatisme politik, dan tantangan geografis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi KPU Kota Manado sudah berjalan efektif namun masih memerlukan penguatan terutama pada aspek edukasi politik berkelanjutan, kerja sama lintas sektor, dan pengembangan inovasi komunikasi yang lebih adaptif bagi berbagai lapisan masyarakat.

***Kata Kunci: Strategi, KPU, Partisipasi Politik, Pemilu 2024, Kota Manado***

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat

## Pendahuluan

Kurangnya pemahaman tentang hak pilih juga menjadi masalah krusial dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kesadaran masyarakat, terutama di kalangan kelompok muda dan kelompok terpinggirkan, mengenai pentingnya pemilu masih rendah. Banyak di antara mereka yang belum memahami bahwa suara mereka memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah pembangunan daerah dan nasional. Hal ini menyebabkan kurangnya keterlibatan mereka dalam proses pemilu, baik dalam tahap sosialisasi, kampanye, maupun pemungutan suara itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya langkah strategis dan berkelanjutan dalam meningkatkan literasi politik masyarakat agar pemilu benar-benar menjadi sarana kedaulatan rakyat yang partisipatif dan inklusif.

Atas hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado telah mengupayakan berbagai tindakan yang bertujuan untuk mengatasi persoalan partisipasi politik di wilayahnya. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui sosialisasi kepada pemilih muda. KPU melaksanakan program "KPU Goes to Campus" untuk memberikan edukasi dan meningkatkan partisipasi pemilih muda di perguruan tinggi. Selain itu, KPU juga mengadakan kegiatan sosialisasi langsung di sekolah-sekolah untuk menjangkau pemilih pemula. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya peran mereka dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. KPU Kota Manado berkomitmen melakukan penyebaran informasi melalui sosialisasi yang

sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018. Dalam peraturan ini, KPU diwajibkan melakukan sosialisasi secara menyeluruh dan menjangkau seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang terpinggirkan seperti penyandang disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil. Melalui sosialisasi tersebut, KPU berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu, serta bagaimana peran setiap warga negara dapat memengaruhi arah kebijakan publik di masa mendatang.

Selain melalui kegiatan langsung, KPU Kota Manado juga memanfaatkan media sosial secara positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penyebaran informasi yang benar, edukasi politik yang menarik, serta kampanye digital yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pemilu. KPU juga meningkatkan upaya kontra narasi terhadap hoaks melalui penyebaran informasi yang akurat dan berbasis fakta di berbagai platform media sosial. Dengan demikian, diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda yang aktif di dunia digital, dapat memperoleh informasi politik yang benar dan bertanggung jawab, serta termotivasi untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

Dengan juga mengacu pada UU NO. 7 Tahun 2017 pasal 1:1 dan pasal 176 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, termasuk pemilu legislatif dan presiden, serta pemilihan kepala daerah (Pilkada). Salah satu

pokok bahasannya adalah tentang partisipasi politik masyarakat, yang harus didorong oleh KPU di berbagai tingkat, termasuk KPU Kabupaten. Dan Hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi Kpu Kota Manado sendiri karena mengingat pada pemilu kali ini didominasi oleh pemilih dari kaum anak anak muda. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kpu untuk bisa meyakinkan para pemilih pemuda ini untuk tetap menggunakan hak pilih mereka pada pemilu 2024. Dan juga sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pemilu. Peraturan ini mengatur tentang tata cara sosialisasi Pemilu yang dilakukan oleh KPU, termasuk yang dilakukan di tingkat kabupaten. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu dan cara-cara berpartisipasi dalam pemilu. Pada Pasal 1: Menyebutkan definisi sosialisasi pemilu dan pentingnya proses ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak pilih mereka. Dan pada Pasal 3 berbunyi : KPU Kabupaten berperan dalam menyelenggarakan sosialisasi yang menjangkau seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang sering terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas dan kelompok muda. Dengan ini Penulis mengharapkan bisa mendapatkan solusi kongkrit dari Kpu Kota Manado dalam strategi meningkatkan partisipasi politik di Kota Manado dan diharapkan juga hal ini bisa menjadi acuan ataupun tolak ukur terhadap pemilihan umum yang akan datang nantinya..

### **Penelitian Terdahulu**

Rifqi Aulia dan Milka (2024) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi komunikasi yang digunakan oleh KPU Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi Generasi Z pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 serta menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi KPU Kota Palangka Raya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif, dengan mengamati konsep SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh KPU Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi generasi Z pada Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 antara lain: kolaborasi KPU Kota Palangka Raya dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, sosialisasi berjenjang, kirab Pemilu 2024, pemanfaatan media elektronik dan media internet dalam memberikan informasi terkait Pemilu kepada masyarakat. Pencapaian strategi komunikasi yang belum maksimal tidak terlepas dari faktor keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Strategi Komunikasi yang dilakukan oleh dalam meningkatkan partisipasi generasi Z telah memenuhi seluruh unsur komunikasi.

Hanafi, Ngaf If Atu Rrosidah, Nur Salsabila Ariella Kurniawati, Putri Hartika Sari (2024) Penelitian ini bertujuan untuk KPU Kabupaten Tulungagung berkomitmen dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang profesional dan berkualitas serta memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. KPU Kabupaten Tulungagung memiliki peran strategis dalam mendorong dan memfasilitasi partisipasi politik

masyarakat Tulungagung khususnya Warga Binaan Lapas Kelas II B Tulungagung untuk dapat menyalurkan hak pilihnya. Melalui metode kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi, penelitian ini menemukan bahwa KPU Kabupaten Tulungagung telah melakukan berbagai pendekatan seperti sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana pemungutan suara bagi Warga Binaan Lapas Kelas II B Tulungagung.

Muhammad Ridho Rifansyah dan Rosyidatuzzahro Anisykurillah (2024) Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU), khususnya KPU Provinsi Jawa Timur berpedoman pada keputusan KPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Tujuan penelitian tersebut yaitu menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menghadapi Pemilu tahun 2024. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dimana proses pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur yang diperoleh melalui artikel, buku, informasi dan sebagainya yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dari strategi yang diterapkan KPU Jawa Timur dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, dibuktikan dari adanya beberapa agenda kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan seperti Kirab Pemilu, nobar film "Kejarlah Janji" dan terima kunjungan pihak eksternal.

Persamaan dengan penelitian terdahulu, persamaan ketiga penelitian

diatas dengan penelitian ini yaitu Semua penelitian memiliki tema besar yang sama, yaitu strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Dan Metode kualitatif menjadi pendekatan utama dalam semua penelitian. Serta fokus pada peran KPU, strategi sosialisasi, dan komunikasi yang digunakan.

Perbedaan ketiga penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu, fokus penelitian dan lokasi penelitian serta metode pengumpulan data yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada masalah penelitian, bagaimana dan apa saja Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Manado. Dengan merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Verba, Scholzman, dan Brady (1995) tentang mobilitas politik. Yang menjelaskan bahwa lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU, memainkan peran penting dalam memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi. Mobilisasi politik terjadi ketika individu atau organisasi mengajak orang lain untuk terlibat dalam proses politik, seperti pemungutan suara, diskusi, atau kampanye. Pada teori ini juga ditemukan tiga faktor yang mempengaruhi suatu partisipasi politik. Ketiga faktor tersebut adalah : Resources (sumber daya), Recruitment (rekrutmen), Engagement (keterlibatan).

1. Aspek Resources (sumber daya)  
Sumber daya mengacu pada faktor-faktor yang mendukung individu atau kelompok dalam proses mobilisasi politik. Ini mencakup aspek finansial, material, serta sumber daya non-material seperti waktu, keterampilan, dan akses terhadap informasi.

2. Aspek Recruitment (rekrutmen)

Rekrutmen mengacu pada proses di mana individu atau kelompok dilibatkan atau diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Ini bisa melibatkan ajakan langsung, promosi, atau persuasif yang mendorong orang untuk aktif dalam pemilu atau aktivitas politik lainnya.

3. Aspek Engagement (keterlibatan) Keterlibatan mengacu pada seberapa dalam dan aktif individu atau kelompok terlibat dalam proses politik. Ini mencakup partisipasi dalam diskusi politik, organisasi, kampanye, dan kegiatan lainnya yang lebih intens

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan atau bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Manado yang terletak di Jln. Lumimuut No. V Kelurahan Tikala Kumarak, Kec. Wenang.

Penelitian ini berfokus pada analisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum 2024 melalui tiga elemen utama strategi, yaitu: (1) aspek resources, (2) aspek recruitment, dan (3) aspek engagement..

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan

memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data interaktif yang disampaikan oleh Miles dan Hubberman (1990:20) terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan Kesimpulan.

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024, KPU Kota Manado menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah SDM sekretariat yang tersedia hanya 12 orang, padahal standar minimal yang ditetapkan adalah 17 orang. Untuk mengatasi kekurangan ini, KPU menjalin kerja sama strategis dengan perguruan tinggi melalui program magang dan praktik kerja lapangan. Langkah ini bersifat mutualisme, karena selain memenuhi kebutuhan tenaga teknis, KPU juga berkontribusi dalam pendidikan mahasiswa.

KPU juga berupaya meningkatkan kapasitas internal melalui *in-house training*, pendalaman regulasi, dan internalisasi PKPU sebagai upaya memperkuat profesionalisme penyelenggara. Selain itu, badan ad-hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS berperan besar dalam pelaksanaan teknis di lapangan dan menjadi unsur penting dalam menunjang mobilisasi pemilih.

Masyarakat pada umumnya menilai bahwa fasilitas dan informasi yang disediakan KPU cukup membantu dalam proses pemilihan. Kemudahan mengakses informasi melalui media sosial, kelengkapan fasilitas di TPS, serta kesiapan petugas lapangan menjadi faktor

pendukung. Namun demikian, beberapa hambatan teridentifikasi, seperti kesalahan administrasi, waktu pelaksanaan yang kurang fleksibel bagi mahasiswa, serta maraknya hoaks dan praktik politik uang yang dapat memengaruhi psikologis pemilih.

Strategi rekrutmen KPU pada Pemilu 2024 tidak lagi melibatkan relawan demokrasi, sehingga fungsi sosialisasi sepenuhnya dilaksanakan oleh badan ad-hoc. KPU menerapkan berbagai metode sosialisasi yang bersifat persuasif dan informatif, antarlain: (1) Talkshow “Rabu Bacarita” melalui kerja sama dengan media televisi dan radio, (2) Sosialisasi tatap muka di tempat ibadah, ruang publik, dan komunitas kecil, (3) Pemanfaatan sarana pengeras suara di rumah ibadah, (4) Kolaborasi dengan pemuka agama, pemerintah kota, dan lembaga penegak hukum.

Melalui pendekatan tersebut, KPU Manado berhasil mencapai tingkat partisipasi pemilih yang tinggi sehingga memperoleh apresiasi dari KPU RI sebagai salah satu daerah dengan partisipasi tertinggi secara nasional. Informasi mengenai pentingnya partisipasi pemilu umumnya diperoleh masyarakat melalui media sosial, lingkungan pergaulan, dan pendidikan formal. Responden menilai bahwa metode sosialisasi KPU mudah dipahami dan cukup efektif. Namun demikian, beberapa informan menilai bahwa KPU masih kurang optimal dalam pemanfaatan media digital, terutama platform yang populer di kalangan generasi muda seperti TikTok dan Instagram.

KPU Kota Manado menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat pemungutan suara. Untuk itu, KPU melaksanakan pendidikan pemilih secara kontinyu, khususnya bagi pemilih pemula (usia 17–24 tahun). KPU juga mengoperasionalkan teori *Trias Politica* Montesquieu sebagai kerangka hubungan antar-lembaga dalam penyelenggaraan pemilu, di mana legislatif menjadi pembentuk regulasi, eksekutif mendukung pelaksanaan teknis, dan yudikatif melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa. Dalam kerangka ini, KPU berperan sebagai lembaga penyelenggara independen yang tetap diawasi oleh Bawaslu dan lembaga hukum lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik selain memilih menunjukkan variasi. Beberapa informan aktif dalam diskusi publik dan kegiatan kampus, sedangkan sebagian lainnya tidak berminat karena menganggap aktivitas politik bersifat pencitraan. Motivasi untuk berpartisipasi sebagian besar dipengaruhi oleh kesadaran pribadi sebagai warga negara, pengaruh lingkungan, pengalaman berorganisasi, serta harapan terhadap perbaikan kondisi negara dan daerah.

### **Aspek Resources (Sumber Daya)**

Aspek *resources* mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta infrastruktur pendukung pemilu. Sumber Daya pada Pemilu 2024

Pada Pemilu 2024, KPU didukung oleh:

1. Anggaran yang relatif besar dari pemerintah pusat

2. Distribusi logistik yang lebih tertata
3. Pemanfaatan teknologi informasi (seperti sistem informasi pemilih)

Hal ini berdampak pada:

1. Kelancaran proses pemungutan suara
2. Aksesibilitas pemilih ke TPS
3. Minimnya hambatan teknis

Dampak:

Partisipasi pemilih tetap tinggi ( $\pm 82-83\%$ ).

### Aspek Recruitment (Rekrutmen Penyelenggara)

Aspek ini mencakup proses seleksi dan kualitas badan ad hoc seperti:

1. PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)
2. PPS (Panitia Pemungutan Suara)
3. KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

### Pemilu 2024

Pada Pemilu nasional:

Aspek	Pemilu 2024	Dampak
Resources	Tinggi	Pengaruh sedang
Recruitment	Optimal	Pengaruh kuat
Engagement	Sangat masif	Pengaruh sangat kuat

1. Rekrutmen dilakukan lebih ketat dan terstandarisasi
2. Pelatihan penyelenggara lebih intensif
3. Pengawasan dari berbagai pihak lebih kuat

Dampak:

1. Profesionalisme penyelenggara meningkat
2. Pelayanan kepada pemilih lebih baik
3. Kepercayaan publik meningkat

### Aspek Engagement (Keterlibatan Pemilih)

Aspek *engagement* berkaitan dengan upaya KPU dalam membangun interaksi dan kesadaran pemilih.

### Strategi Engagement pada Pemilu 2024

KPU melakukan berbagai strategi:

1. Sosialisasi masif melalui media sosial dan tatap muka
2. Program pendidikan pemilih
3. Kampanye partisipasi (misalnya ajakan datang ke TPS)

Dampak:

1. Tingkat kesadaran pemilih meningkat
2. Partisipasi tetap tinggi

Dari ketiga aspek tersebut, dapat disimpulkan:

Temuan utama:

1. Engagement adalah faktor paling dominan
2. Recruitment berpengaruh pada kepercayaan
3. Resources menjadi faktor pendukung

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan pemilu. Kekurangan jumlah SDM sekretariat (12 dari minimal 17 orang) merupakan kondisi yang kerap terjadi di banyak daerah, terutama pada masa tahapan pemilu ketika beban kerja meningkat secara signifikan.

Strategi KPU Kota Manado dalam mengatasi kekurangan ini melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dapat dipahami sebagai bentuk *resource optimization*. Dalam teori manajemen publik, strategi ini dikenal sebagai *collaborative governance*, di mana lembaga pemerintah melibatkan institusi eksternal untuk meningkatkan kapasitas pelaksanaan program. Mahasiswa yang ditempatkan sebagai peserta magang atau PKL tidak hanya memberikan bantuan tenaga, tetapi juga menjadi agen diseminasi informasi politik di lingkungan mereka.

Selain aspek kuantitas, KPU juga menekankan peningkatan kualitas SDM melalui *in-house training* dan internalisasi regulasi. Hal ini selaras dengan teori pengembangan organisasi yang menekankan bahwa kapasitas lembaga sangat ditentukan oleh kompetensi aparatur, terutama ketika lembaga tersebut menjalankan fungsi teknis dan regulatif sekaligus.

Dari perspektif masyarakat, fasilitas yang disediakan KPU dinilai cukup membantu. Namun keluhan terkait administrasi seperti tidak tercantumnya nama dalam DPT menunjukkan bahwa masih ada aspek teknis yang perlu diperbaiki. Temuan ini memperkuat teori perilaku pemilih yang menyatakan bahwa hambatan administratif dapat menurunkan partisipasi politik.

Secara menyeluruh, pembahasan ini menunjukkan bahwa :

1. KPU Kota Manado berhasil mengoptimalkan strategi sumber daya melalui kolaborasi, pelatihan internal, dan penguatan kapasitas ad-hoc.
2. Sosialisasi pemilu berlangsung efektif, tetapi masih perlu peningkatan pada ranah digital.
3. Keterlibatan masyarakat cukup tinggi, namun partisipasi non-voting masih rendah karena masalah motivasi dan persepsi politik.
4. KPU telah mengimplementasikan teori mobilisasi politik melalui pendekatan tatap muka, komunitas, dan edukatif.
5. Peran KPU mencerminkan prinsip Montesquieu, yaitu bekerja dalam mekanisme checks and balances bersama eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
6. Strategi-strategi yang diterapkan terbukti berkontribusi pada tingginya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Kota Manado

## Penutup Kesimpulan

KPU Kota Manado mampu memaksimalkan kinerja melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, optimalisasi tenaga ad-hoc, dan pelatihan internal yang memperkuat pemahaman terhadap regulasi. Meskipun jumlah SDM sekretariat terbatas, strategi collaborative governance membantu menjaga kelancaran tahapan pemilu dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan.

KPU Kota Manado menerapkan beragam bentuk sosialisasi seperti tatap muka, kegiatan komunitas, program “Rabu Bacarita”, pendidikan pemilih pemula, serta penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial. Namun, ketiadaan Relawan Demokrasi dan pemanfaatan digital yang belum maksimal menyebabkan jangkauan informasi masih bisa diperluas, terutama pada kelompok pemilih muda yang dominan menggunakan platform digital.

Masyarakat Kota Manado menunjukkan antusiasme dalam menggunakan hak pilih. Namun keterlibatan mereka pada aktivitas pra-pemilu seperti diskusi publik, pendidikan politik, dan pemantauan cenderung rendah karena faktor motivasi, persepsi politik, serta kurangnya informasi yang merata. Meskipun demikian, KPU berhasil menjalankan fungsi edukatif dan mobilisasi politik sesuai teori Verba, Schlozman, & Brady melalui pendekatan persuasif, informatif, dan partisipatif.

KPU bekerja secara independen namun tetap berkoordinasi dengan eksekutif,

legislatif, dan yudikatif dalam koridor checks and balances. Kolaborasi antarlembaga ini membantu memastikan pemilu berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pendekatan berbasis komunitas, tatap muka, pendidikan pemilih pemula, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terbukti mampu memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

## Saran

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan formasi pegawai sekretariat agar kebutuhan minimal terpenuhi.
2. KPU perlu melanjutkan dan memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya untuk kebutuhan tenaga bantu berbasis digital dan administrasi.
3. Pelatihan berkelanjutan untuk PPK, PPS, dan KPPS perlu ditingkatkan, terutama pada aspek integritas, literasi digital, dan manajemen pemilu.
4. KPU perlu meningkatkan produksi konten kreatif pada platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook.
5. Melibatkan influencer lokal, komunitas kreatif, dan organisasi pemuda dapat meningkatkan daya tarik sosialisasi pemilu.
6. Pengembangan sistem informasi interaktif mengenai DPT, TPS, tahapan, dan tata cara pemungutan suara perlu diperkuat

## Daftar Pustaka

- Apriyanti, Y., Lorita, E., & Yusuarsono, Alexander, C., & Pal, L. A. (1998). *Digital democracy: Policy and politics in the wired world*. Oxford: Oxford University Press.

- Aulia, R. (2024). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi politik Generasi Z pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024: Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dalam meningkatkan partisipasi politik Generasi Z pada Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. *Kaganga Komunika: Journal of Communication Science*, 6(1), 11–24.
- Becker, G. (1998). *The structure of political systems: A comparative approach*. New York: Oxford University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Castells, M. (1997). *The power of identity*. Oxford: Blackwell.
- Chandler, A. D. (1962). *Strategy and structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Cholisin. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Effendy, O. U. (2017). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Faulks, K. (1999). *Political sociology: A critical introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Hacker, K., & van Dijk, J. (2000). *Digital democracy: Issues of theory and practice*. London: SAGE Publications.
- Hanafi, H., et al. (2024). Peran KPU Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan partisipasi politik warga binaan Lapas Kelas II B Tulungagung pada Pemilu serentak tahun 2024. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(10), 6–6.
- Hendryadi, et al. (2019). *Metodologi penelitian: Konsep, teknik, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, S. P. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta: Rajawali Press.
- Indriantoro, N., & Supono, M. (2012). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Katarudin, H., & Putri, N. E. (2020). Pengaruh literasi politik terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilukada Kota PARIAMAN tahun 2018. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 70–79.\*
- Maryani, S., & Wulandari, R. R. (2025). Analisis keterampilan literasi membaca digital Generasi Z dalam mengidentifikasi berita hoaks di era digital. *Jurnal TEDC*, 19(1), 8–15.\*
- Milbrath, L. W. (2014). *Political participation: How and why do people get involved in politics?* New York: Routledge.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morrisan. (2005). *Komunikasi politik: Paradigma dan praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Prasetyo, N., Asrinaldi, A., & Zetra, A. (2022). The model partisipasi politik masyarakat Sumatera Barat dalam Pilpres tahun 2019. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 259–268.\*

- Rifansyah, M. R., & Anisykurlillah, R. (2024). Analisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam menghadapi Pemilu tahun 2024. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 1–15.\*
- Rozi, S., & Heriwanto, H. (2019). Demokrasi Barat: Problem dan implementasi di dunia. *Jurnal Al-Aqidah*, 11(2), 189–207.\*
- Sarbaini, H. (2015). Pendidikan kewarganegaraan: Perspektif demokrasi dan hak asasi manusia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sampe, S. (2021). Why political parties don't and do matter in local government elections in Indonesia: A Manado case. *Revista de Sociologia e Política*, 29, e003.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tutik, T. T. (2010). Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Warren, H. G. (n.d.). *Elections in a democratic society*. New York: Free Press.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (1995). *Strategic management and business policy* (Vol. 46). Reading, MA: Addison-Wesley.
- Yusuf, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar